

BAB 5

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN IMPLIKASI

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini menguji pengaruh total aset pemerintah daerah, jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, jumlah satuan kerja perangkat daerah dan jarak geografis terhadap kelemahan pengendalian intern. Analisis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda dengan program *Statistical Package for Social Science* (SPSS) versi 20. Data sampel sebanyak 361 Pemerintah Daerah yang menerbitkan laporan keuangan di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2014. Hasil pengujian dan pembahasan pada bagian sebelumnya dapat diringkas sebagai berikut:

1. Total aset pemerintah daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kelemahan pengendalian intern Pemerintah Daerah.
2. Jumlah penduduk tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kelemahan pengendalian intern Pemerintah Daerah.
3. Pertumbuhan ekonomi Pemerintah Daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kelemahan pengendalian intern Pemerintah Daerah.
4. Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kelemahan pengendalian intern Pemerintah Daerah.
5. Jumlah Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) berpengaruh positif secara signifikan terhadap kelemahan pengendalian intern Pemerintah Daerah.
6. Jarak geografis berpengaruh positif secara signifikan terhadap kelemahan pengendalian intern Pemerintah Daerah.

5.2 Keterbatasan

Penelitian ini mempunyai keterbatasan yakni beberapa variabel yang diteliti ternyata tidak menunjukkan pengaruh terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah di Indonesia. Sehingga masih banyak variabel lain diluar penelitian ini yang bisa digunakan untuk menguji pengaruhnya terhadap kelemahan pengendalian intern. Salah satunya adalah penggunaan variabel yang terkait dengan pihak yang melakukan pemeriksaan (auditor).

Penelitian ini hanya menggunakan variabel yang terkait dengan auditee (yang diperiksa). Penelitian mendatang bisa menggunakan variabel yang terkait dengan auditor karena sejatinya, efektifitas pengendalian intern juga dipengaruhi oleh hasil pemeriksaan pada tahun-tahun sebelumnya. Alasannya adalah, hasil temuan kelemahan pengendalian intern oleh auditor harus ditindaklanjuti oleh auditee, sehingga atas temuan hasil pemeriksaan, maka pemerintah daerah (auditee) melakukan perbaikan-perbaikan pada point-point yang menjadi temuan. Atas perbaikan-perbaikan ini, pengendalian intern menjadi lebih baik pada tahun-tahun berikutnya.

Kemampuan auditor dalam menemukan kelemahan yang signifikan di dalam sistem pengendalian intern auditee, salah satunya ditentukan oleh jangka waktu auditor tersebut menduduki jabatan sebagai auditor (*auditor tenure*). Semakin lama seorang auditor menjabat sebagai auditor, maka dia akan semakin berpengalaman dalam menemukan area kritis yang menjadi pokok kelemahan dalam sistem pengendalian intern auditee. Kelebihan ini tidak dimiliki oleh seorang auditor dengan masa kerja yang lebih singkat.

Penelitian dengan topik kelemahan pengendalian intern Pemerintah daerah di Indonesia masih terbuka lebar untuk diteliti pada masa yang akan datang. Dengan banyaknya penelitian lanjutan, diharapkan mampu memberikan hasil penelitian yang lebih baik sehingga makin terbuka determinan/ faktor-faktor yang mempengaruhi kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah di Indonesia.

5.3 Implikasi

Hasil penelitian ini memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu auditing pada sektor publik, khususnya mengenai pengaruh total aset pemerintah daerah, jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, jumlah SKPD dan jarak geografis terhadap kelemahan pengendalian intern.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bukti empiris bahwa jumlah SKPD dan jarak geografis antara auditor dan klien berpengaruh secara signifikan terhadap kelemahan pengendalian intern. Sedangkan total aset, jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa kelemahan pengendalian intern secara umum terjadi pada pemerintah daerah dengan banyak jumlah SKPD yang lebih banyak serta pemerintah daerah yang lebih jauh jaraknya dari kantor BPK Perwakilan.

Implikasi atas hasil temuan ini bagi pemerintah daerah adalah hendaknya pemerintah daerah lebih memperhatikan pengendalian intern mereka, terutama terkait dengan aspek banyaknya jumlah SKPD serta jarak geografis. Pemerintah daerah yang memiliki urusan yang lebih kompleks yang ditandai dengan banyaknya jumlah SKPD serta pemerintah daerah dengan jarak geografis yang lebih jauh dari kantor BPK Perwakilan mempunyai masalah pengendalian intern yang lebih banyak, sehingga pemerintah daerah hendaknya lebih banyak mengalokasikan sumberdaya untuk memelihara pengendalian mereka agar efektif.